

KERANGKA ACUAN – Konsultan Daerah

Nama Posisi	:	Fasilitator Masyarakat Lokal/ Local Community Facilitator
Lokasi Penempatan	:	Sintang, Ketapang, Landak, Manggarai Barat
Tipe Kontrak	:	Konsultan Individual
Durasi Penugasan Yang Diharapkan	:	Kontrak Mei-Desember (8 bulan) ; dapat diperpanjang berdasarkan kinerja, ketersediaan anggaran dan kebutuhan organisasi.

Latar Belakang dan Konteks Organisasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan Presiden Indonesia menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas utama pembangunan dalam masa pemerintahannya. Komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2015-2019 yang menargetkan tingkat kemiskinan berkurang dari 11,25% di tahun 2014 menjadi 7-8% di tahun 2019.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan karena sejak 1998 hingga saat ini tingkat kemiskinan selalu menurun. Namun demikian, 28,3 juta manusia Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 30% dari 12,5% penduduk yang berada dalam garis kemiskinan masih rentan untuk masuk kembali dalam kemiskinan.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dan pengawasan program-program perlindungan sosial dan kemiskinan di bawah kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2010 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2015 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk dan diberi mandat untuk mengkoordinasi dan mengawasi program-program tersebut.

TNP2K berperan utama dalam mendefinisikan kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- Meningkatkan program yang menggunakan metode umum dan daftar keluarga untuk semua program-program perlindungan sosial;
- Meningkatkan kinerja program-program penanggulangan kemiskinan melalui reformasi dalam desain program;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dampak terhadap program-program bantuan sosial; dan
- Membantu kementerian-kementerian dan lembaga negara terkait dalam menjaga kualitas program.

TNP2K - KIAT Guru Program

Untuk meningkatkan pelaksanaan layanan pendidikan di garis depan, mulai tahun 2014 TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden RI telah melaksanakan pilot program untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas guru (KIAT Guru). Tujuan utama KIAT Guru adalah untuk memberdayakan masyarakat agar berkontribusi kepada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, yang diukur dari berkurangnya kemangkiran guru, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan hasil belajar murid. KIAT Guru direncanakan sebagai program multi-tahun, yang dimulai dari pra-pilot untuk mengujicoba mekanisme dan instrumen penelitian di tahun 2014-2016 dan diikuti oleh pilot di tahun 2016-2020.

KIAT Guru Fase 1 (KGP1) telah dilaksanakan untuk menguji dua mekanisme guna meningkatkan kehadiran dan kinerja guru serta hasil belajar murid. Mekanisme pemberdayaan masyarakat (MPM) memberi masyarakat peran yang sangat jelas untuk memantau dan mengevaluasi layanan guru dan untuk memastikan akuntabilitas guru. Ada juga mekanisme pembayaran berbasis kinerja (PBK), yang mengaitkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) dengan kehadiran atau kualitas layanan guru. Efektivitas kedua mekanisme

tersebut telah diujicoba dengan mengombinasikan keduanya dalam tiga kelompok intervensi yaitu: (1) MPM, (2) MPM +PBK berbasis kehadiran guru, dan (3) MPM +PBK berbasis kualitas layanan guru.

Bank Dunia telah melakukan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan KGP1 untuk mengidentifikasi kelompok intervensi mana yang paling efektif untuk meningkatkan hasil belajar murid. 270 SD diacak dan dibagi menjadi tiga kelompok intervensi dan satu kelompok kontrol. Analisis evaluasi dampak menemukan secara statistik dampak positif terhadap semua kelompok intervensi. Namun, kombinasi antara MPK + PBK berbasis kehadiran (kelompok 2) memiliki dampak paling kuat dalam meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Indonesia (pada deviasi standar 0,19 dan 0, 17). Demikian pula, tampak adanya peningkatan kehadiran guru penerima TKG di kelas dan keterlibatan orang tua dalam bentuk pertemuan dengan guru dan bimbingan anak di rumah.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak dan pembelajaran pelaksanaan KGP1, Pemerintah Indonesia berencana memperluas cakupan pelaksanaan dan memberlakukan intervensi yang serupa untuk membuat Tunjangan Profesi berbasis kinerja. 5 Kabupaten pelaksana KPG1 juga telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran mereka (sekitar 700,000 USD) untuk memantapkan intervensi kelompok 2 dan menjadikan kelompok 1 dan 3 menjadi kelompok 2 semua. Pada November 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta dukungan kepada Bank Dunia untuk rencana perluasan tersebut dan mengujicobakan mekanisme serupa di SMP menggunakan Tunjangan Profesi.

KIAT Guru Fase 2 (KPG2) akan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti penelitian kepada Kemdikbud, BAPPENAS, Kemenkeu tentang bagaimana pemerintah secara efektif dapat menerapkan secara nasional TKG dan TPG berbasis kinerja. Pemerintah Indonesia berencana membuat kebijakan TKG dan TPG berbasis kinerja secara nasional mulai tahun 2020 dan akan mempertimbangkan masukan dari pelaksanaan KPG2 sebagai masukan. Hasil dari KPG2 juga dapat memberikan masukan terhadap mekanisme desain untuk mengadaptasi UU ASN dalam sektor pendidikan dan penggunaan Dana Desa bagi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan dasar pendidikan. KPG1 dan KPG2 dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI, dengan arahan dari Tim Pengarah diketuai oleh Kemendikbud dan TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden RI.

BaKTI Foundation

Program KIAT Guru didukung oleh Pemerintah Australia (DFAT) dan Amerika (USAID). Kedua institusi ini memberi dukungan dana untuk program melalui *Local Solutions to Poverty (LSP) Multi-Donor Trust Fund* dan *Local Service Delivery (LSD) Single Donor Trust Fund*, yang kedua dikelola oleh Bank Dunia. *Social Development Unit* – Bank Dunia bertanggungjawab atas tatakelola program dalam mendukung TNP2K, dan untuk itu telah menunjuk Yayasan BaKTI sebagai Penerima Hibah yang berperan dalam pengelolaan, operasional, dan pengawasan fidusia untuk dukungan teknis dan pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional dan daerah. Posisi ini adalah bagian dari Kantor Program KIAT Guru di TNP2K, yang bertanggungjawab untuk mengelola implementasi kegiatan dan dukungan operasional program.

Ruang Lingkup

Tujuan Posisi

Tujuan dari posisi Fasilitator Masyarakat Lokal adalah untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas guru dan mendorong alokasi sumber daya desa untuk pelayanan pendidikan dasar.

Tanggung Jawab

Fasilitator Masyarakat Lokal akan bertanggung jawab untuk menyampaikan jasa-jasa sebagai berikut:

1. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat di antaranya dengan cara; memfasilitasi pertemuan sosialisasi desa, penyepakatan janji bersama, pertemuan rutin bulanan dan pertemuan evaluasi jani bersama sesuai target yang telah ditentukan dan memastikan keterlibatan sukarelawan/wati

- di tiap-tiap desa dalam pelaksanaan rintisan KIAT Guru.
2. Memfasilitasi penyedia layanan, pengguna layanan, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di desa dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa dan di kecamatan.
 3. Mengaktifkan forum-forum di tingkat desa sebagai wahana supervisi dan pembelajaran pemangku kepentingan tingkat desa/sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar.
 4. Membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan pertanggung jawaban keuangan.
 5. Membantu pelaksanaan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan tingkat desa.

Koordinasi

Penyelia posisi ini adalah Koordinator Advokasi Daerah.

Hasil Keluaran Kunci

Fasilitator Masyarakat harus mampu mencapai target keluaran sebagai berikut:

1. Dibuatnya rencana kerja bulanan dan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan.
2. Dihasilkannya janji bersama dan Kelompok Pengguna Layanan antara penyedia dan pengguna layanan.
3. Adanya sukarelawan/wati di masing-masing desa yang bersedia memfasilitasi pertemuan pengguna dan penyedia layanan.
4. Dilatihnya dan dimentorinya sukarelawan/wati agar dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan.
5. Terbentuknya Kelompok Pengguna Layanan dengan pengesahan dari SK Kepala Desa/Kampung.
6. Diaktifkannya pertemuan rutin bulanan di desa dampingan sebagai forum pembelajaran dan dialog bagi pemangku kepentingan tingkat desa/sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar.
7. Digunakannya pedoman dan instrumen pemantauan hasil (monitoring result instrument guideline) yang relevan oleh penyedia dan pengguna layanan di desa dan sekolah serta oleh sukarelawan/wati KIAT Guru.
8. Dialokasikannya sumberdaya desa untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru serta pelayanan pendidikan

Kompetensi dan Persyaratan

Pendidikan dan Pengalaman Kerja:

1. Minimal lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dengan minimum 1 tahun pengalaman terkait dengan pemberdayaan masyarakat

Usia dan Tempat Tinggal:

1. Minimal berusia 24 tahun dan maksimal 45 tahun saat melamar dan terbukti berdomisili di Provinsi setempat paling tidak selama 1 tahun.

Fungsional:

1. Menunjukkan kemampuan dalam menulis laporan perkembangan dan laporan keuangan secara baik dan benar dengan menggunakan sistem operasi Ms. Office.
2. Menunjukkan kemampuan untuk melayani berbagai tuntutan masyarakat dengan telaten dan berdedikasi.
3. Menunjukkan kemampuan dan kesuksesan dalam melaksanakan dan memfasilitasi diskusi kelompok terarah, lokakarya maupun pelatihan, merupakan suatu kelebihan.
4. Menunjukkan kemampuan menulis dan berbicara dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, diutamakan yang menguasai bahasa lisan setempat.
5. Menunjukkan kemampuan untuk menjalankan langkah-langkah dan proses program secara umum, merencanakan tindakan dan/atau tugas dengan tepat waktu; mampu memecahkan masalah untuk meraih keluaran yang diharapkan secara efektif.

Manajerial:

1. Menunjukkan kemampuan untuk mengelola prioritas kerja,waktu dan beragam tugas-tugas secara efektif dan efisien, mampu untuk mengatasi perubahan prioritas dan pekerjaan program, dan mampu untuk mengelola berbagai tugas majemuk di bawah tekanan.
2. Menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang sensitif dan lingkungan kebijakan yang menantang, dan dalam memberikan respon atas permintaan pemangku kepentingan secara cepat dan berkualitas.
3. Menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara mandiri dengan supervisi minimum, sambil berkonsultasi dengan orang lain.

Perilaku:

1. Menunjukkan kepribadian yang memiliki jiwa terbuka, petualang dan menyukai tantangan bekerja di wilayah-wilayah terpencil dan sulit.
2. Menunjukkan karakter yang tidak mudah menyerah, mendengarkan orang lain dan mampu meresolusi konflik antar individu.
3. Menunjukkan kemauan yang kuat untuk memelihara dan menjaga hubungan kerja yang positif dengan orang lain, baik secara internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi atau pemangku kepentingan terkait.
4. Menunjukkan kemampuan interpersonal yang baik dan sebagai anggota tim yang kuat, dapat untuk berkomunikasi secara efektif, dan mampu untuk bekerja dengan pendekatan yang berorientasi padatim di kelompok orang yang beragam.
5. Menunjukkan motivasi dan potensi sebagai pembelajar yang cepat (*quick learner*), pemulai mandiri (*self-starter*) serta berkehendak menjadi pemimpin masa depan dengan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, kejujuran, integritas dan demokrasi.
7. Tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi profesi keguruan.

Pelaporan dan Struktur Koordinasi

